

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Adawiyah, I. M. (2022) Tinjauan Atas Penyelesaian SPM Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta II. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Barata, A. A. dan Tihartanto, B. (2005). *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Cresswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tahun 2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021). Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tahun 2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- Febriana, A. A. (2021). Pengaruh *Professional Judgment* dan Independensi Auditor Terhadap Pemberian Opini Audit dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Moderator. <https://doi.org/10.1097/00006247-198308000-00009>
- Hansen, F. (2007). Human Error: A Concept Analysis. *Journal of Air Transportation, Volume 11, No. 3, 11(3)*, 61–77.
- Hardiputra, A. J. (20 September 2021). *Agar SPM Tidak Ditolak KPPN, Lakukan Langkah Berikut. KPPN Surabaya II*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya2/id/data-publikasi/berita-terbaru/2905-agar-spm-tidak-ditolak-kppn,-lakukan-langkah-berikut.html> diakses tanggal 03 Juni 2023.
- Herriyanto, H. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Program Studi Perencanaan Dan Kebijakan Publik FEUI, 1–138. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20303954-T30796-HendrisHerriyanto.pdf>
- Kamaratih, R. (2022) Tinjauan atas Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terhadap Proses Pencairan Dana APBN di KPPN Jakarta I. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (22 Mei 2023). Siaran Pers: Resiliensi APBN Terjaga, Namun Pemerintah Mencermati Moderasi Penerimaan Negara. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-KITA-Mei-2023> diakses tanggal 03 Juni 2023.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- KPPN Jakarta II. (11 Agustus 2022). Profil KPPN Jakarta II Menuju Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2022 - KPPN Jakarta II [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=WrlJq6VL-EA>
- KPPN Jakarta II. (2023). *Sejarah KPPN Jakarta II*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/profil/profil-kppn-jakarta-ii/sejarah.html> diakses tanggal 15 Desember 2023.
- KPPN Jakarta II. (2023). *Visi, Misi, Tugas dan Fungsi KPPN Jakarta II*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/profil/profil-kppn-jakarta-ii/visi-misi/114-profil.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2023.
- KPPN Jakarta II. (2023). *Struktur Organisasi KPPN Jakarta II*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/profil/profil-kppn-jakarta-ii/struktur-organisasi.html> diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Kuswoyo, I. D. (2012). Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja Di Akhir Tahun Anggaran (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah KPPN Kediri). Universitas Gadjah Mada.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371–378.
- Mukhtaromin. (30 Maret 2023). *Konsep Pengujian Tagihan Belanja Negara/Daerah/Desa*. Balai Diklat Keuangan Pontianak. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/konsep-pengujian-tagihan-belanja-negaradaerahdesa-336780> diakses tanggal 28 Desember 2023.

- Nasution, D. A. D., Supraja, G., & Damanik, A. F. (2022). Implementasi Surat Perintah Membayar Berbasis Kinerja pada Sektor Publik di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1477–1491. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p07>
- Nugroho, Y. P., Basuki, Fanani, Z. (2017). Analisis Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span) Dalam Proses Pencairan Dana APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, 17(1), 67–80. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.1982>
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- Posner, R. A. (1972). A Theory of Negligence. *The Journal of Legal Studies*, 1(1), 29–96. <http://www.jstor.org/stable/724011>
- Retina, Z. (2007). Tingkat Kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia terhadap PP No.24 Tahun 2005 dan Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah dan Total Aktiva. Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia.
- Setyawan, A. (2016). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015. Universitas Airlangga.
- Sianturi, N. J., Ritonga, S., & Salam, R. (2023). Analisis Kualitas Layanan Pencairan Dana Dengan Aplikasi Elektronik Surak Perintah Membayar Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2083–2096. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1540>
- Solikhin. (2014). Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja. Universitas Gadjahmada.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sukadi. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran. Universitas Gadjahmada.

- Thoha, M. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Yanfi, A. F. (2022) Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67–83. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>